



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Metode Value For Money Pada Pemerintahan Kota Surakarta Tahun 2020-2022

Muhammad Awallu Rizqi¹; Sonny Fransisco Siboro²;
Fikri Ramadhan¹; Jonathan Gracia Hutagalung⁴

¹⁻⁴ Universitas Bina Sarana Informatika

Corresponding author: awwallurizqi08@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to measure the financial performance of Surakarta City Local Government using the value for money approach. A qualitative descriptive approach was used in this research. Postpositivist research utilizes natural conditions, with the researcher as the main instrument. Based on the data, the financial performance of the Surakarta City Government was evaluated using economic ratios in 2020-2021, and with an overall average of 85.28%, it fell into the economic category. In terms of efficiency, it is measured by the efficient ratio from 2020-2022 with an overall average of 96.24% but in 2020-2021 which is included in the efficient category and in 2020 it is not included in the efficient category. From the effective side, it is measured by the effective ratio from 2020-2022 with an overall average of 98.74% but only in 2020 which is not included in the effective category and the following year 2021-2022 is included in the effective category.*

Keywords: *Financial Performance, Value For Money, Economy, Efficiency, Effectiveness*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan value for money. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian postpositivis memanfaatkan kondisi alam, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Berdasarkan data tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta dievaluasi menggunakan rasio ekonomi tahun 2020–2021, dan dengan rata-rata keseluruhan sebesar 85,28% masuk dalam kategori ekonomi. Dari sisi efisien diukur dengan rasio efisien dari tahun 2020-2022 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 96,24% tetapi di tahun 2020-2021 yang termasuk dalam kategori efisien dan di tahun 2020 tidak termasuk dalam kategori efisien. Dari sisi efektif diukur dengan rasio efektif dari tahun 2020-2022 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 98,74% tetapi di tahun 2020 saja yang tidak termasuk dalam kategori efektif dan tahun berikutnya 2021-2022 termasuk dalam kategori efektif.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Value For Money, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik mengalami kemajuan pesat di Indonesia, seiring dengan berkembangnya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah atau kabupaten yang diberi otonomi akan mampu membentuk dan mengelola sumber pendapatannya sendiri dalam upaya memajukan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil yang telah dicapai, pencapaian peningkatan pendapatan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pentingnya kinerja pelayanan publik sebagai indikator seberapa baik kinerja sektor publik dalam memberikan layanan masyarakat yang unggul guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Visi, misi, maksud dan tujuan organisasi sektor publik tidak akan

Received: Maret 28, 2024; Accepted: Juni 28, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Muhammad Awallu Rizqi, awwallurizqi08@gmail.com

tercapai apabila kinerja dalam pelayanan publik tidak mendapat pertimbangan yang matang. Padahal evaluasi langsung masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja pelayanan publik juga menjadi pertimbangan dalam menilai tingkat keberhasilan sektor publik.

Menurut (Syamsi, 2013) dalam (Nurul Sukma Handayani, 2019) Kemampuan suatu daerah dalam mencari dan mengelola sumber daya keuangan daerah baru untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, sistem pemerintahan, dan pertumbuhan daerah dikenal dengan istilah kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut peraturan perundang-undangan, daerah boleh membelanjakan uangnya untuk kepentingan komunitas lokalnya dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah federal.

Entitas sektor publik telah lama menerapkan pengukuran kinerja. Nilai uang ditekankan selain pertimbangan finansial dalam pendekatan ini. Nilai uang, yang didasarkan pada tiga metrik ekonomi, efisien, dan efektif menggambarkan administrasi perusahaan sektor publik. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan alokasi anggaran, laporan APBD perlu diteliti. Oleh karena itu, penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rangka menetapkan strategi keuangan untuk tahun anggaran mendatang.

Menurut (Yafiz, Fadhilah, & Hasibuan, 2023) Value for money adalah konteks ekonomi lokal di mana pemerintah dapat dibawa ke daerah yang memiliki sistem pemerintahan yang tepat. Penggunaan value for money biasanya digunakan dalam pengelolaan dana publik, sehingga sistem pengelolaan keuangan dan anggaran pemerintahan harus benar. Indikator yang digunakan untuk pengukuran value for money harus diperoleh dari nilai anggaran dan realisasi belanja daerah serta anggaran dan realisasi pendapatan daerah.

Laporan APBD Kota Surakarta Tahun 2020-2022

	Anggaran		
	2020	2021	2022
Pendapatan	1.789.457.852.502	1.945.769.363.239	2.152.659.533.038
Pendapatan Asli Daerah	402.870.481.279	514.200.704.362	740.143.061.392
Pendapatan Transfer	1.308.605.395.918	1.370.600.374.312	1.412.516.471.646
Lain-lain Pendapatan	77.981.975.305	60.968.284.565	-
Belanja	1.886.698.244.826	2.221.062.144.098	2.459.974.822.361
Belanja Operasi	1.446.695.853.389	1.664.231.490.735	1.983.429.017.273
Belanja Modal	285.769.230.150	413.480.653.363	453.875.805.088
Belanja Tak Terduga	153.233.661.287	109.600.000.000	22.170.000.000
Transfer	999.500.000	33.750.000.000	500.000.000
Surplus (Defisit)	-97.240.392.324	-275.292.780.858	-307.315.289.323
Pembiayaan	-	-	-
Penerimaan Daerah	105.310.864.321	291.894.539.353	314.315.289.323
Pengeluaran Daerah	8.070.472.000	50.351.758.495	7.000.000.000
Pembiayaan Netto	97.240.392.321	241.542.780.858	307.315.289.323
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-

Berdasarkan tabel Laporan APBD diatas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Laporan RPBD Kota Surakarta Tahun 2020-2022

Realisasi			
	2020	2021	2022
Pendapatan	1.831.319.373.387	1.939.268.856.769	2.028.438.691.046
Pendapatan Asli Daerah	492.776.208.640	560.579.997.086	647.440.585.332
Pendapatan Transfer	1.269.819.659.567	1.321.146.389.683	1.376.198.105.714
Lain-lain Pendapatan	68.723.505.180	57.542.470.000	4.800.000.000
Belanja	1.639.665.226.421	1.866.496.348.304	2.088.323.395.600
Belanja Operasi	1.349.814.240.936	1.489.971.451.913	1.700.583.774.120
Belanja Modal	250.969.805.187	341.100.953.660	380.832.881.832
Belanja Tak Terduga	37.881.680.298	35.423.942.731	6.406.739.648
Transfer	999.500.000	0	500.000.000
Surplus (Defisit)	191.654.146.966	72.772.508.465	-59.884.704.554
Pembiayaan	-	-	-
Penerimaan Daerah	108.310.864.321	291.894.539.353	314.315.289.323
Pengeluaran Daerah	8.070.471.934	50.351.758.495	0
Pembiayaan Netto	100.240.392.387	241.542.780.858	314.315.289.323
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	291.894.539.353	314.315.289.323	254.430.584.769

Sumber : *ppid.surakarta.go.id*

Berdasarkan tabel Laporan RPBD diatas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Surakarta mencapai value for money dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan menggunakan data keuangan terbaru dan berbagai metode analisis yang tepat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang seberapa efisien, efektif, dan berkelanjutan pemerintah daerah di Indonesia. Diharapkan hasilnya akan membantu pengambilan kebijakan, praktisi, dan meningkatkan kinerja fisik pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

- Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Khusaini, 2019) akuntansi sektor public merupakan prinsip akuntansi sektor publik, proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2020) akuntansi sektor publik adalah suatu media informasi berfungsi sebagai penyedia informasi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat sekitar untuk mengakui dan mengontrol manajemen.

Ada kemungkinan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pencatatan keuangan dan informasi tentang tanggung jawab manajemen terhadap masyarakat. Para

ahli menguraikan definisi ini dengan jelas.

- **Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut (Wiratna, 2017) dalam (Sarmiento, 2018) kinerja keuangan merupakan hasil dari evaluasi pekerjaan yang telah selesai, yang dievaluasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan harus dievaluasi dan diukur secara berkala.

Menurut (Sari, 2016) dalam (Martanti, 2019) Derajat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah, yang meliputi pengeluaran dan penerimaan daerah melalui sistem keuangan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam satu periode anggaran, disebut dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

- **Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut (Mahsun, 2013) dalam (Sarmiento, 2018) Proses evaluasi kemajuan pekerjaan sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikenal dengan pengukuran kinerja. Ini berisi data tentang seberapa baik sumber daya digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa, kualitas barang dan jasa tersebut, seberapa baik kegiatan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, dan seberapa baik tujuan dicapai melalui tindakan.

Menurut (Mardiasmo, 2016) dalam (Sarmiento, 2018) tujuan pengukuran kinerja keuangan daerah guna untuk memenuhi :

1. Memajukan kinerja pemerintahan daerah.
2. Pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya dibantu.
3. Pertanggungjawaban publik dan peningkatan komunikasi kelembagaan.

- **Value For Money**

Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam (çimen, Nasution, & Mokhammad Samsul Arif, 2020) value for money adalah dasar pengukuran kinerja organisasi pemerintah. Penilaian kinerja pemerintah harus mempertimbangkan input, output, dan hasil, bukan hanya output.

Menurut (Mahmudi, 2007) dalam (çimen et al., 2020) value for money adalah konsep penting dalam organisasi sektor publik, di mana pengelolaan organisasi sektor publik didasarkan pada tiga kriteria utama: ekonomi, efisien, dan efektif.

- **Indikator Value For Money**

Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam (çimen et al., 2020) konsep VFM didasarkan dari pengukuran 3 elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

1. Ekonomis.

Berkaitan dengan persyaratan dan jumlah tertentu dari suatu organisasi mengenai cara terbaik untuk mendapatkan masukan dengan biaya terendah. Oleh karena itu, nilai masukan dibandingkan dengan masukan untuk melakukan tindakan ekonomi.

2. Efisiensi.

Untuk mendapatkan hasil terbaik dengan serangkaian masukan tertentu atau hasil terbaik dengan serangkaian masukan terkecil. Hasilnya, masukan dan keluaran yang dihubungkan dengan standar atau target kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan untuk mengukur efisiensi.

3. Efektivitas.

Mengenai seberapa baik hasil program memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, membandingkan hasil dengan keluaran adalah cara menentukan efektivitas program.

METODE

Metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2022) dalam (Khoiriah, 2022) Kondisi alam dipelajari dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang berpijak pada filosofi post-positivisme dan menggunakan peneliti sebagai alat utama. Menurut (Moelong, 2014) dalam (Iii & Penelitian, 2014) Memahami fenomena pengalaman subjek yang diteliti, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, merupakan tujuan penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai metode organik untuk mendeskripsikannya menggunakan kata-kata dan bahasa dalam suasana alami.

HASIL

1. Gambaran Umum Kota Surakarta

Surakarta merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak antara garis bujur $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ BT dan antara garis lintang $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ selatan. Seluruh wilayah Surakarta merupakan daerah dataran rendah, dengan pusat kota 95 m dpi dan daerah sekitarnya 105 m dpi. Luas wilayahnya adalah 44,1 km³, atau 0,14% dari luas provinsi Jawa Tengah.

Geografis Sekitar 65 km sebelah timur laut D.I. Yogyakarta dan 100 km ke arah tenggara Semarang adalah tempat Anda akan menemukan kota Surakarta. Selain itu, dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi yang sama-sama memiliki ketinggian 3.115

meter di barat dan 2.806 meter di timur.

Karena banyaknya sungai yang mengairi sawah, perkebunan, dan daerah lainnya, maka daerah Surakarta sangatlah subur. Sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo, adalah salah satunya. Selain itu, Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes dilalui sungai ini.

Terdapat lima kecamatan yang membentuk kota Surakarta: Kecamatan Laweyan mempunyai sebelas kecamatan; Kecamatan Serengan memiliki tujuh kecamatan; Kecamatan Pasar Kliwon memiliki sembilan kecamatan; Kecamatan Jebres memiliki sebelas kecamatan; dan Kecamatan Banjarsari mempunyai tiga belas kecamatan. Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Karanganyar di timur, dan Kabupaten Sukoharjo di selatan dan barat merupakan perbatasan wilayah Kota Surakarta.

2. Visi, Misi Kota Surakarta

A. Visi

“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera”

B. Misi

- 1) Meningkatkan standar kesehatan masyarakat yang kuat.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang fleksibel dan berkelanjutan.
- 3) Tercapainya infrastruktur dan tata ruang kota yang mendorong pengembangan pariwisata dan kebudayaan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat dan generasi muda di bidang ekonomi, pendidikan, olahraga, dan seni.
- 5) Menciptakan pelayanan publik berdasarkan kerja sama dan keberagaman, serta tata kelola yang gesit dan kooperatif.
- 6) Mewujudkan kesejahteraan secara adil dan inklusif bagi setiap penduduk kota.
- 7) Terwujudnya lingkungan yang aman dan kerukunan antar umat beragama dalam komunitas yang saling menghormati.

3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dengan metode VFM.

Tiga komponen kunci membentuk landasan VFM, sebuah paradigma manajemen untuk organisasi sektor publik: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Alokasi layanan dan harga merupakan faktor dalam pengukuran kinerja. Peneliti akan melakukan Analisa dengan 3 elemen utama sebagai berikut :

1) Pengukuran Ekonomis.

Ekonomis merupakan kehematan yang juga berarti bertindak dengan hati-hati

dan menghindari pemborosan. Sebuah kegiatan operasional dianggap ekonomis jika dapat mengurangi biaya yang tak perlu (Berliana, 2021). Tingkat ekonomi dirumuskan sebagai berikut :

$$Ekonomis = \frac{Input}{Input\ Value} \times 100\%$$

Ketentuan :

Jika kurang dari <100% berarti ekonomis.

Jika sama dengan =100% berarti ekonomis berimbang.

Jika lebih dari >100% berarti tidak ekonomis.

Analisis perhitungan rasio ekonomis Pemerintah Kota Surakarta yang diukur dalam 3 tahun, yaitu :

Tabel 1. Tingkat ekonomis

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis	Keterangan
2020	1.639.665.226.421	1.886.698.244.826	86,91%	Ekonomi
2021	1.866.496.348.304	2.221.062.144.098	84,04%	Ekonomi
2022	2.088.323.395.600	2.459.974.822.361	84,89%	Ekonomi

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan data diatas, rasio ekonomis Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 86,91%, tahun 2021 sebesar 84,04% dan tahun 2022 sebesar 84,89%. Rasio ekonomis Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan diperoleh sebesar 85,28% yang berarti termasuk dalam kategori ekonomis.

2) Pengukuran Efisiensi.

Produktivitas dan efisiensi saling terkait erat. Untuk mengukur efektivitas, kita membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan keluaran yang digunakan. Efisiensi dalam proses operasional adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu barang atau hasil tertentu dengan sumber daya yang paling sedikit. Karena efisiensi dan ekonomi bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi biaya, pada dasarnya keduanya memiliki gagasan yang sama (pengurangan biaya). Data nyata diperlukan untuk membandingkan tingkat output suatu organisasi sektor publik dengan tingkat inputnya (Berliana, 2021). Tingkat efisiensi dirumuskan sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Ketentuan :

Jika lebih dari >100% berarti tidak efisien.

Jika kurang dari <100% berarti efisien.

Jika sama dengan =100% berarti efisien berimbang.

Analisis perhitungan rasio efisien Pemerintah Kota Surakarta yang diukur dalam 3 tahun, yaitu :

Tabel 2. Tingkat efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisien	Keterangan
2020	1.639.665.226.421	1.831.319.373.387	89,53%	Efisien
2021	1.866.496.348.304	1.939.268.856.769	96,25%	Efisien
2022	2.088.323.395.600	2.028.438.691.046	102,95%	Tidak Efisien

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan data diatas, rasio efisien Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 89,53%, tahun 2021 sebesar 96,25% dan tahun 2022 sebesar 102,95%. Rasio efisien secara keseluruhan sebesar 96,24%. Rasio efisien Pemerintah Kota Surakarta tahun 2020-2021 termasuk dalam kategori efisien dan di tahun 2022 yang dimana tidak termasuk dalam kategori efisien.

3) Pengukuran Efektivitas.

Efektivitas merupakan berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses operasional dianggap efektif jika mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Berliana, 2021). Tingkat efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Ketentuan :

Jika kurang dari >100% berarti efektif.

Jika sama dengan =100% berarti efektif berimbang.

Jika kurang dari <100% berarti tidak efektif.

Analisis perhitungan rasio efektif Pemerintah Kota Surakarta yang diukur dalam 3 tahun, yaitu :

Tabel 3. Tingkat efektivitas

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisien	Keterangan
2020	1.831.319.373.387	1.789.457.852.502	102,34%	Tidak Efektif
2021	1.939.268.856.769	1.945.769.363.239	99,67%	Efektif
2022	2.028.438.691.046	2.152.659.533.038	94,23%	Efektif

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan data diatas, rasio efektif Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 102,34%, tahun 2021 sebesar 99,67% dan tahun 2022 sebesar 94,23%. Rasio efektif secara keseluruhan sebesar 98,74%. Rasio efektif Pemerintah Kota Surakarta yang dimana tahun 2020 termasuk dalam kategori tidak efektif dan tahun 2021-2022 termasuk dalam kategori efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan, Kinerja keuangan Pemerintahan Kota Surakarta diukur dengan rasio ekonomis dari tahun 2020-2021 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 85,28% yang berarti termasuk kedalam kategori ekonomis. Kinerja keuangan Pemerintahan Kota Surakarta diukur dengan rasio efisien dari tahun 2020-2022 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 96,24% tetapi di tahun 2020-2021 yang termasuk dalam kategori efisien dan di tahun 2020 tidak termasuk dalam kategori efisien. Kinerja keuangan Pemerintahan Kota Surakarta diukur dengan rasio efektif dari tahun 2020-2022 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 98,74% tetapi di tahun 2020 saja yang tidak termasuk dalam kategori efektif dan tahun berikutnya 2021-2022 termasuk dalam kategori efektif.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan kata syukur dan terimakasih sebesar besarnya kepada tuhan yang maha esa yang menjadi penopang terbaik sepanjang penulisan jurnal ini dan ucapan terimakasih kepada Bapak Sonny Fransisco Siboro Selaku dosen matakuliah Akuntansi Sektor Publik yang membimbing kami hingga kami dapat menyelesaikan jurnal ini.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada anggota kelompok pembuatan jurnal ini yang bernama : Muhammad Awallu Rizqi, Fikri Ramadhan , Jonathan Gracia Hutagalung. Yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan Jurnal ini hingga Jurnal ini Dapat di selesaikan.

DAFTAR REFERENSI

- Berliana, N. (2021). Landasan Teori اديج. Dasar-Dasar Ilmu Politik, 17–39.
- Cimen, S., Albar, N.F. & Arif. M.S. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 12(2), 6. Retrieved from: <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Khoiriah. (2022). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian, 32–41.
- Martanti, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017). uii.ac.id, 12–39. Retrieved from: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16693/05.2_bab_2.pdf?sequence=6
- Handayani, N.S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. 1–12. Retrieved from: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengertian-keuangan-daerah-7229819c/detail/>

- Sarmento, Manuela NC. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Air Minum Ira-Mor Dengan Perusahaan Bemor Di Timor Leste (Study Kasus Perusahaan Ira-Mor Dan Perusahaan Bemor, Dili, Timor Leste). Universitas Atmajaya Yogyakarta, 6–21.
- Yafiz, M., et al. (2023). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Menggunakan Value for Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(4), 40–56. Retrieved from <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i4.1623>
- Zaini Miftach. (2018). 濟無 No Title No Title No Title, 53–54